

SEJARAH TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN TAMIANG 1874-1912

Desi Amelia

Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra, Langsa

e-mail: *desiamelia.unsam@gmail.com*

Abstraksi

Politik adu domba yang di lakukan Belanda terhadap Tamiang telah berhasil memecah persatuan antara Negeri Karang dengan Negeri Kejuruan Muda. Pada thun 1908 atas desakan raja-raja Tamiang agar Tamiang keluar dari Residentic Sumatera Timur dan masuk kedalam Gouverment Aceh Onderhoorigheden dan disatukan dengan Afdelling Aceh Timur maka keluarlah surat Stosteblad (Stbl) tahun 1908 No. 112 yang kemudian Tamiang atas surat dari Aceh Timur tersebut. Maka kerajaan Tamiang yang di pimpin oleh seorang Neumon (controluer) yang semula berpusat di kerajaan Seruway.

Kata Kunci: Kerajaan Tamiang, Aceh Timur

Pendahuluan

Pada 10 Juli 1909 Gouverment Acehen Onderafdeeling mengeluarkan ketetapan dengan No. 39 tentang perubahan politik keuangan dimana seluruh keuangan landeschap- landeschap di pusatkan secara Sentralistic dalam satu kas yaitu Onderafdeeling Van Tamiang bertempat di kantor Controleur. Kemudian Controleur menyusun anggaran belanja sehingga biaya dan pemasukan setiap Landeschap di tentukan oleh Onderafdeeling Begrooting

Pada tahun 1908 masing-masing landeschap yang ada di tamiang berhak memiliki hak otonomi di bidang keuangan namun, 10 Juli 1908 atas pemerintah Gubernur Aceh yang telah mengeluarkan

ketetapan agas seluruh keuangan yang ada di landaschap agar dijadikan satu menjadi onderafdeling van Tamiang. Agar biaya masuk dan keluar dari hasil bumi dari setiap landaschap di akhiri oleh anggaran belanja.

Dalam rangka pelaksanaan politik ini selanjutnya pemerintah hindia belanda melakukan beberapa usaha, diantaranya mencerdaskan rakyat dengan mendirikan sekolah-sekolah, membuka jalan raya, serta yang paling menonjol adalah memajukan perekonomian rakyat dengan cara menebang hutan untuk perkebunan dan pertanian.

Pada tahun 1901, ketika VanHeut 2 (selaku gubernur sipil dan militer di aceh) meminta kepada Dinas Topografi untuk

membuat sebuah peta ikhtisar Aceh dan daerah taklukannya. Sesudah pembuatan peta ini, beberapa tempat didalam wilayah Aceh khususnya Aceh Timur mulai dieksplorasi dan eksploitasi. Perkebunan-perkebunan swasta pemerintah mulai dibuka serta pengusahanya lebih ditingkatkan. Sesudah pembuatan peta ini beberapa tempat di wilayah Aceh khususnya Aceh Timur mulai di eksplorasi dan eksploitasi. Perkebunan-perkebunan swasta mulai di buka serta perusahannya lebih di tingkatkan.

Dengan dibukanya perkebunan juga di bukanya transportasi yang tujuannya untuk mempermudah membawa hasil perkebunan ke dalam pabrik. N.V Hendelsere Eniging Amsterdam dan SOCFINDO juga membuka kebun Kelapa Sawit diwilayah Aceh Barat, meliputi 11.325 Ha dengan produksi 8.835 ton. Dengan adanya perusahaan perkebunan Eropa di Aceh Timur secara tidak langsung telah membawa perubahan system pertanian tradisional masyarakat, dimana rakyat juga ikut menanam karet dan kelapa sawit di kebun-kebun mereka. Dengan adanya penyuluhan oleh pemerintah Belanda tentang pertanian modern kepada rakyat.

Pada tahun 1788 daerah Tamiang Hilir terjadi keributan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang hendak

menguasai daerah tersebut. Kampung-kampung di bakar rakyat banyak yang di bunuh, harta benda rakyat banyak yang musnah sehingga raja kejuruan karang mengambil langkah agar peristiwa tersebut di laporkan pada Panglima Deli. Kemudian panglima Deli memerintahkan adiknya untuk mengamankan daerah Tamiang Hilir.

Tamiang Hilir daerah utara mulai dari pantai Beringin ke selat Malaka dijadikan perwalian karang dan wilayah Tamiang Hilir bagian Selatan mulai dari Bukit Selamat ke Selat Malaka menjadi daerah perwalian Kejuruan Muda. Dengan pembagian tersebut, maka panglima Deli mendirikan Ibu Negeri perwalian di Tanjung Mulia dan daiknya di Seruway. Pada bulan Desember 1878, laskar Tamiang melakukan penyerangan terhadap Pos Penjagaan Belanda di Bukit selamat secara tiba-tiba dan mendadak, sehingga 14 serdadu belanda mati dan 5 orang lainnya luka parah dengan kejadian itu belanda menjaga ketat perairan tamiang.

Pada tahun 1908 atas desakan raja-raja Tamiang agar Tamiang keluar dari Resicentie Sumatera Timur dan masuk kedalam Gouverment Aceh enonderhoorigheden dan disatukan ke dalam Afdeling Aceh Timur, maka keluarlah surat Stostebblad tahun 1908 No. 112 dan ditetapkanlah Tamiang menjadi

bentuk status hukum Onderrafdelling dibawah pimpinan seorang Controleur B.B.

Onderafdelling Tamiang Landschap Kejuruan Muda Tanjung Raja Sulung, Landschap Negeri Karang T. Muhammad Arifin, Landschap Seruway T. Zainal Abidin, Landschap Sungai Iyu T. Ismail dan tahun 1908 Bendahara disatukan dengan Karang. Zelfbestuurder (Kepala Pemerintahan Daerah) memiliki hak otonomi dalam bidang keuangan, mereka dapat memungut seluruh cukai hasil bumi dan dapat dipergunakan langsung setelah menyerahkan bagian berdasarkan persentase kepada Gouvernment Via Controleur.

Setelah terjadinya peralihan struktur pemerintahan dimana wilayah Tamiang telah dibagi menjadi 5 Beestuur Komisi masyarakat Tamiang berhasrat memilih seorang Wedana yang untuk mengkoordinir ke 5 Beestuur tersebut. Dalam hasil musyawarah pemuda Tamiang pada awal bulan Mei 1946 terpilihlah untuk pertama kalinya T. Maimoen Habsyah sebagai Wedana Tamiang pertama dan Joebahar Dt. Nan Labih sebagai asisten Wedana.

Untuk menindaklanjuti hasil pembentukan "IKMAT" (Ikatan Kesatuan Masyarakat Tamiang) pada tanggal 13 Maret 1957 disahkan oleh Dewan

Organisasi Pusat (DOP) untuk diajukan kepada pemerintah adalah

1. Mengusulkan atas perubahan status kecamatan yang hanya terdiri 3 kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan yaitu kecamatan Kota Kuala Simpang, Kec. Kejuruan Muda, Kec. Karang Baru, Kec. Seruway, Kec. Bendahara, Kec. Sungai Iyu, Kec. Tamiang Hulu.
2. Rencana anggaran biaya kabupaten Aceh Tamiang yang diusulkan kepada pemerintah pusat agar sebagian milik Tamiang dialokasikan kembali kepada bangunan-bangunan yang telah runtuh.

Program 5 tahun yang direncanakan oleh pemerintah pusat agar disalurkan kepada obyek-obyek yang ada diwilayah kewedan Tamiang. Setelah raja-raja tamiang menandatangani perjanjian singkat dengan pemerintah kolonial belanda maka belanda pun mulai mengeksploitasi hutan-hutan yang ada di tamiang untuk di buka perkebunan karet dan kelapa sawit. Berdirinya perkebunan di tamiang berkaitan erat dengan keberadaan perkebunan yang ada di Sumatra Timur (Deli) yaitu perkebunan tembakau. Namun pada awal abad 19, pengusaha Belanda bernama NIENHUIS mendirikan (suatu perusahaan baru yang dinamakan Deli Maatschappj yang didirikan oleh Raja William 1). Modal-modal lain pun bermunculan karena

mudahnya memperoleh tanah dari Sultan Deli. Selain itu pemasarannya juga tidak mengalami kesulitan. Pihak Amerika, Inggris, Belgia membuka perkebunan-perkebunan

Namun hal ini sangat berbeda dengan berdirinya perkebunan di tamiang. Jika berdirinya kebun tembakau NHM pada abad ke 19, namun tidak dengan perkebunan di tamiang, dimana pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke 20 mereka tidak mengandalkan kekerasan lagi. Tetapi baru bisa mengambil simpati rakyat dimana para pemimpin kenegerian atau uleebalang, keujreun bersedia menghentikan perlawanan dan mau menandatangani korteverklaring diberlakukan secara baik serta dibantu untuk memperoleh kehidupan yang wajar.

Letak geografis wilayah tamiang terletak pada posisi $03^{\circ} 53' 18.81''$ - $04^{\circ} 14,51'-89''$ LU dan $97^{\circ} 43' 41.51''$ - $98^{\circ} 14',45 41''$ BT dan wilayah tamiang berada pada ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut. Sehingga hal ini cocok untuk areal perkebunan salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Langkah ini di tempuh oleh pemerintah belanda karena factor kesesuaian tanah di tamiang cocok untuk kebun kelapa sawit. Di samping itu juga karena daerah tamiang dekat dengan sumatera timur yang terlebih

dahulu dibuka perkebunan tembakau,karet,dan kelapa sawit. Kelapa sawit yang merupakan tanaman yang berasal dari afrika di bawa oleh pemerintah colonial belanda ke tamiang. Setelah berhasilnya Mammitius. membawa 4 batang bibit kelapa sawit untuk di tanam di kebun raya bogor.

Pada akhir tahun 1939 di seluruh Aceh terdapat tidak kurang dari 133 buah usaha perkebunan budi daya,dengan luasnya masing-masing 2000 Ha menurut jenisnya,karet 34.060 Ha,kelapa sawit 11.325 Ha, kopi 2.745 Ha, the 850 Ha, pinus markusi 70.000 Ha.

Memasuki abad XX pemerintah telah menganjurkan kepada penduduk agar ditanam pohon-pohon kelapa di kebun mereka. untuk itu pemerintah colonial belanda memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada penduduk. daerah yang menarik perhatian pemerintah hindia belanda adalah aceh besar dan pulau weh.

Tahun 1910 pemerintah kolonial Belanda memusatkan lokasi perkebunan karet dan kelapa sawit dari daerah yang sekarang di kenal dengan Aceh Timur. Sehingga tahun 1923 jumlah perkebunan diaceh timur ada 20,12 kebunkaret, 7 kebun kelapa sawit dan 1 kebun kelapa selain itu juga terdapat perkebunan milik belgia SOCFIN perkebunan ini selain

diperuntukan untuk menanam kelapa sawit juga menanam kopi dan karet.

Perkebunan PT. SOCFINDO masuk kedalam kenegerian kejuruan Muda dengan nama Zelfbedtuuder (kepala pemerintahan daerah) yang memiliki hak otonomi dalam bidang keuangan dengan nama Zelfbedtuurder "T Raja Sulung". Kenegerian Kejuruan Muda adanya kampung yang berperan penting di dalam kenegerian Kejuruan Muda antara lain: Kampung Ronggoh, Kalui, Lubuk Mandai, Seumadam, Sungai Liput, Minuran, Tanjung Mancang, Benua Tunu, Paya Perang, Kuta Lintang, Bukit Sulim, Alur Manis, Bukit Selamat dan lain-lainnya. Perkebunan PT. SOCFINDO masuk kedalam perkampungan Sungai Liput.

PT. SOCFINDO didirikan oleh M. Bunge. Sementara itu aktivitas pembukaan dan pembangunan perkebunan PT. SOCFINDO pertama kali di Indonesia yang sudah dibuka pada tanggal 26 febuari 1908 dikebun Sungai Liput Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan perusahaan perkebunan milik negara Belgia dengan luas areal perkebunannya 30 ha. Pada tahun 1922 perkebunan ini berkembang menjadi 5750 Hektar dengan jumlah pekerja 3600 orang yang merupakan pekerja dari pulau Jawa yang di pekerjakan di perkebunan ini.

Pada mula berdirinya perkebunan ini bernama PT. SOCFIN (Societe Financire des Caoutchouc), namun Pada tanggal 7 desember 1930, berdasarkan Akta Notaris William Leo no. 45, nama dan legeslitas PT. SOCFINDO Medan S.A (sociate Financiere des Cootchous Medan sociate Anonyme) resmi digunakan. Selain itu perkebunan ini tidak saja membuka lahan perkebunan di Tamiang tetapi juga di Meulaboh dan Singkil dan tidak saja kelapa sawit tetapi juga tanaman karet.

Letak berdirinya perusahaan perkebunan sangatlah strategis dalam hal ini pengusaha perkebunan PT. SOCFINDO hanya berjarak 1 meter dari jalan raya (jalan Medan-Banda Aceh) yang pada saat itu mempermudah mengangkat hasil-hasil perkebunan kedalam pabrik. Selain berjarak hanya 1 meter dari jalan raya (jalan Medan-Banda Aceh) perusahaan perkebunan juga berjarak \pm 5 meter dari rel kereta yang menghubungkan kereta api Aceh dengan kereta api milik DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) yang dipergunakan juga untuk mengangkat hasil-hasil pabrik. Perusahaan perkebunan selain perkebunan berada di Sungai Liput, namun sebagian lagi perkebunan berada kedalam kenegerian Karang Baru yang bertempatnya di Kampung Medang Ara. PT. SOCFIN Indonesia Sei Liput atau Sei Liput Medang Ara Estate yang masuk

pada group Manager I merupakan cabang dari PT. SOCFIN Indonesia Medan Sumatra Utara. Perseroan ini bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan buah kelapa sawit.

Lokasi perkebunan terletak di daerah kabupaten Aceh Tamiang (Nanggroe Aceh Darussalam) dan terbagi atas empat divisi (Afdelling) yaitu (Rama Niza Putri, 2010: 7)

- a. Afdelling satu, meliputi daerah: Alur Meranti, Tanjung Genteng, Seumadam dan luas total areal 946,03 Ha.
- b. Afdelling dua, meliputi daerah: Tanjung Aspak, Mopoli dan Karang Baru dan luas total areal 839,07 Ha.
- c. Afdelling tiga, meliputi daerah: Medang Ara dan luas total arealnya 872,76 Ha.
- d. Afdelling empat, meliputi daerah: Seleleh, dan luas total arealnya 999,63 Ha.

Sehingga jumlah keseluruhan dari divisi I (afdelling satu) sampai divisi IV (afdelling empat) adalah 3.657,49 Ha.

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa perkebunan ini terdiri dari IV Afdelling biasanya masing-masing Afsilling di pimpin oleh asisten kepala (Mandor 1) yang biasanya bertugas disetiap Afdelling di perkebunan dan di bantu oleh asisten Afdelling (Centeng) yang biasanya mengawasi para pekerja yang ada di kebun tuntuk kemudian hasil kerjanya di laporkan kepada asisten kepala. Ditinjau

dari segi fungsinya, kegiatan produksi perkebunan ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Bagian pabrik (pengelolaan).
- b. Bagian tanaman (lapangan).

Bagian pabrik berfungsi sebagai pengelolah tandan buah segar (TBG) menjadi minyak kelapa sawit (MKS) dan inti kelapa sawit (IKS). Bagian tanaman berfungsi sebagai perawat tanaman dari penyiapan bibit sampai menghasilkan tandan buah segar (TBS). Lokasi pabrik Sei Liput adalah areal kebun dan daerah sekitarnya yang diperkirakan terkena dampak karena adanya kegiatan perkebunan sawit dan pengelolahannya. Pabrik pengolahan kelapa sawit terletak di Sei Liput kecamatan Kejuruan Muda yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Tanjung Genteng.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Mopoli.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Darma Agung Estate.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Mopoli.

Pengukuran kualitas udara pada lokasi yaitu 1 lokasi disekitar pabrik (depan kantor), 1 lokasi disekitaran kompleks staff dan lokasi daerah SD Negeri 1 Sei Liput. Hasil analisis kualitas udara dikebun ini masih baik.

Pengukuran kebisingan dilakukan pada 3 lokasi yang hasilnya adalah:

- Pabrik (depan kantor) : 78,5 dB
- Luar pabrik (kompleks staff) : 47,0 dB
- Luar pabrik (SD Negeri 1 Sei Liput) : 45,1 dB

Pada mulanya Pemerintah Hindia Belanda untuk mempekerjakan di perkebunan. Maka mendatangkan buruh dari cina melalui perantara penang dan singapura melalui pelabuhan Batam. Namun karena perantara ini kurang menguntungkan, maka perkebunan tembakau pada saat itu mendirikan suatu badan yang bernama biro imigrasi pada tahun 1880. Hal ini untuk mendatangkan buruh langsung dari cina. Selain mengurus keberangkatan calon buruh Biro ini juga mengurus transfer uang agar upah buruh tersebut dapat dikirim ke keluarga mereka.

Dengan demikian, prospek pekerja sebagai buruh makin menarik bagi mereka karena besarnya resiko mendatangkan buruh tersebut maka dengan sendirinya para pengusaha menyuruh para buruh menandatangani suatu kontrak yang mengikat mereka dalam jangka waktu tertentu.

bahwa di tahun 1955 pengeringan tembakau tidak dilakukan oleh buruh cina. Tetapi dilakukan oleh buruh wanita jawa.

Namun hal ini sama dengan adanya perkebunan yang ada di Tamiang. Tidak saja buruh laki-laki jawa yang bekerja sebagai mengambil buah sawit dari pohon. Tetapi wanita-wanitanya juga bekerja membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekeliling kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat di perkebunan PT. SOCFINDO dari afdeling I-IV. Belanda mulai melakukan transmigrasi penduduk Jawa yang berprofesi sebagai petani untuk memberikan contoh cara-cara bertani yang lebih efektif dan efisien misalnya dalam cara menanam padi dan menggunakan bajak. Belanda mendatangkan pula varietas bibit tanaman padi.

Mendirikan sebuah Dinas Penyuluhan pertanian (Landbouw Voorlichtingsdienst) untuk memberikan penerangan dan penyuluhan dibidang pertanian rakyat, termasuk mendirikan kebun percontohan (Proeftuin). Berbagai upaya ini telah meningkatkan luas dan hasil produksi pertanian dan kebun di Aceh. Tidak saja penduduk pulau Jawa yang bekerja di pemerintah colonial Belanda tetapi penduduk di luar Jawa seperti pulau Madura yang penduduknya dipekerjakan di perkebunan mereka.

5 tahun kemudian tampak dengan pemukiman desa dan pemerintahan orang jawa. Hal ini dapat dilihat jelas dari afdeling V desa selele yang

PT.Perkebunan Socfindo menjadi desa mandiri dengan kepala pemerintahannya orang Jawa sampai sekarang. Peranan perkebunan yang ada di Aceh Tamiang sangat tidak mendukung masyarakat sekitarnya baik sebagai tenaga kerja maupun lainnya karena tidak sesuai dengan iklim masyarakat sekitarnya. Yang dilakukan Belanda didalam bidang pertanian membawa Aceh suatu pengalaman baru, yaitu dualisme ekonomi, dimana sisi pertanian modern hidup dengan sisi pertanian tradisional. Tindakan ini dilakukan Belanda bahkan sebelum mereka membangun jalan raya di Aceh, dengan membangun perkebunan-perkebunan yang dikelola secara modern. Disamping memperkuat sistem pertanian tradisional yang sudah ada sebelum Belanda datang ke Aceh.

pada saat pemerintahan Jendral Swart Aceh di ikut sertakan dalam perkembangan dan kemajuan Ekonomi sehingga Ia pun diberi penghargaan oleh Ule Balang pada saat ulang tahunnya yang ke 70. Sejalan dengan slogan Pang Ule Hareukat Meugo, penanaman padi disawah lebih banyak daripada huma (ladang berpindah). Hal ini berbeda dari daerah-daerah lain di Sumatra, dimana perhumaan lebih banyak ditemukan daripada persawahan. Selain itu di Aceh, sawah-sawah juga terdapat di daerah-daerah yang

beririgasi dan berpaya. Dengan demikian yang diperkirakan berjumlah 15.000.000 jiwa, pada tahun 1937 Aceh memiliki 140.000 hektar sawah dan 6.000 hektar huma. Dari produksi 2.000 ton dikirimkan keluar daripada tahun yang sama yang kesemuanya menghasilkan 216.000 ton beras, 3 tahun kemudian surplus melonjak menjadi 24.000 ton.

selain pertanian, perkebunan juga dikembangkan di Aceh dan pemerintah Belanda juga mengembangkan peternakan hewan potong yang sudah dapat diekspor ke pasaran Eropa. Meningkatnya keamanan dan ketertiban, adanya dukungan pemerintah kolonial terhadap kegiatan perekonomian rakyat khususnya dibidang pertanian dan perkebunan, masuknya investor swasta dan juga pedagang dari luar yang bekerja di berbagai sektor peningkatan transportasi dan pembukaan wilayah terisolir telah meningkatkan perekonomian era normal tahun 1920-1940.

Sehingga pada tahun 1941 Aceh mencatat Surplus beras 36.000 ton hal ini dikarenakan bertambahnya sawah irigasi. Namun harga lada merosot dikarenakan menurunnya harga lada di pasaran Internasional. Pemberian bonus yang demikian menimbulkan dua macam tanggapan dari para uleebalang, yang pada umumnya sejalan dengan klasifikasi

dias. Sebagian Uleebalang mengambil yang bersifat menindas yaitu memaksa rakyat untuk meningkatkan pajak. Sebagian lainnya mendorong kenaikan pajak dengan jalan memperbaiki keadaan infrastruktur pertanian atau cara-cara lain yang dapat meningkatkan sarana produksi.

Adanya kenaikan produksi rakyat dan kebijaksanaan para Uleebalang menyebabkan pajak yang ditarik dari rakyat meningkat secara terus menerus dari 1908-1917 yaitu dari 225.000 gulden menjadi 530.000 gulden. Oleh karena itu, adanya kenaikan produksi rakyat dan kebijaksanaan para Uleebalang menyebabkan jumlah pajak yang ditarik dari rakyat meningkat secara terus menerus dari tahun 1908-1917 yaitu dari 225.000 gulden menjadi 530.000 gulden. Akan tetapi karena produksi dan ekspor lada merosot maka mau tidak mau jumlah pajak pendapatan yang ditarik dari rakyat pun ikut berkurang pula. Kecenderungan ini mempengaruhi pendapat daerah-daerah penghasil lada di Idi, Peureulak, Langsa, Bireun, dan Meureudu sehingga mengakibatkan para uleebalang yang ada disana bertindak lebih keras didalam pengumpulan pajak.

Dampak didirikan PT. SOCFINDO dapat dilihat dari segi positif dan negatif.

- a. Pembangunan jalan dan jemabatan yang permanen oleh pemerintah Belanda

dimulai tahun 1904. Lalu tahun 1915-1918 jalan raya yang rusak diperbaiki untuk keperluan mobil yang mulai digunakan, kemudian jalan baru untuk dilewati gerobak. Hubungan lalu lintas kendaraan baik untuk kepentingan pengangkutan barang-barang dagangan dan penumpang melalui jalan umum daratan antara Sumatra Utara (Medan) dan kabupaten Aceh Timur terus ke Banda Aceh.

Kesimpulan

Perlawanan rakyat Aceh terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah hingga awal abad XX masih tetap berlangsung. Ini membuktikan bahwa pemerintah belum berhasil mengamankan Aceh dengan politik pasifikasi Belanda telah berhasil mengamankan Aceh. Pada tahun 1901, Van Heutz meminta dinas topografi untuk dibuatkan peta Aceh dan daerah taklukannya.

Kemudian wilayah Aceh mulai eksploitasi dengan dibukanya lahan pertanian dan perkebunan dan akhir 1939 Aceh terdapat 133 kebun budidaya dengan luas areal masing-masing 2.000 Ha atau lebih luas daerah tanah yang ditanami. Banyak perusahaan perkebunan yang ada di Aceh salah satunya adalah perusahaan perkebunan PT. SOCFIN yang ada Sei Liput didirikan pada tanggal 26 Febuari

1908 yang merupakan perkebunan milik negara Belgia dengan luas perkebunan 30 Ha, namun pada tahun 1922 luas perkebunan sawit ini berkembang 5.750 Ha dengan jumlah pekerja 3.600 orang. Pekerja yang di pekerjaan di perkebunan merupakan pekerja yang berasal dari pulau Jawa dengan sistem kontrak disahkan melalui undang-undang Koeli Oralinantie perkebunan PT. SOCFINDO merupakan cabang dari Medan. Perusahaan perkebunan PT. SOCFIN Sei Liput terdiri dari Afdelling I sampai Afdelling IV sehingga jumlah kesaluran dari Afdelling I sampai Afdelling IV luas areal perkebunan 3.657,49 Ha.

DAFTAR PUSTAKA

- Jongenjang. J (2008), *Negri dan Rakyat Aceh Dahulu dan sekarang*, Banda Aceh, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah
- Louis Gott Chak, (1975). *Mengerti Sejarah, Terjemahan: Nugroho Nuto Susanto*, Jakarta : UI Press
- Mulyana, Edy. (2008) . *Menemukan kembali Saudagar Aceh*, Banda Aceh, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah
- Syamsudin, Helius. (2007) *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Ombak.
- Sufi, Rusdi. (2009), *Pernak- pernik Sejarah Aceh*, Banda Aceh, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Sufi, Rusdi dkk. (2008), *Sejarah Kabupaten Aceh Timur dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*, Banda Aceh, Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mulyana, Edy. (2007), *Aceh menembus batas, Banda Aceh*, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah
- Sufi, Rusdi dan Budi Wibowo Agus. (2007), *Organisasi Pergerakan Nasional di Aceh Awal Abad XX*, Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Reid, Antony. (2007), *Asal mula konflik aceh*, Jakarta : yayasan obor Indonesia
- M.H. Thamrin dan Edy Muliana.(2008), *Meleburnya Propinsi Aceh* Banda Aceh : Badan Arsip Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Peljer, Jkarl.(1985), *Dean Keboen dan Petani Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, Jakarta : Sinar Harapan
- Nurdin, M. (1972), *Daerah Kabupaten Atjeh Timur Selayang Pandang*, Langsa : Pekan Kebudayaan Aceh II Daerah Langsa Kabupaten Aceh Timur
- Leirissa, R.Z.(1985), *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*, Jakarta Akademik Presindo.